

LAPORAN TAHUNAN

YAYASAN TIFA 2019



PARTISIPASI
UNTUK KEADILAN

03

KATA PENGANTAR

DEWAN PENGURUS YAYASAN TIFA

Yayasan Tifa sepanjang tahun 2019 terus berpartisipasi aktif membangun masyarakat yang terbuka, setara, inklusif, dan berkhidmat untuk keadilan di Indonesia.

04

KATA PENGANTAR

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN TIFA

Menyongsong perubahan Yayasan Tifa di Januari 2020, pada akhir 2019, Yayasan Tifa melakukan perubahan program serta struktur organisasi di tingkat tim eksekutif.

05

YAYASAN TIFA:

BERPARTISIPASI UNTUK KEADILAN

06 Tentang Yayasan Tifa

07 Nilai – Nilai Yayasan Tifa

08 Struktur Yayasan Tifa 2019

09 Program Yayasan Tifa 2019

11 Distribusi Dana Hibah 2019

13

MITRA YAYASAN TIFA

MENDORONG KETERBUKAAN, MEWUJUDKAN KEADILAN

14 Indonesia Budget Center (IBC)

Mendorong Transparansi Anggaran di Daerah

16 Indonesian Parliamentary Center (IPC)

Mewujudkan Parlemen Terbuka dan Akuntabel

18 MaPPI FHUI

Menghapus Ketimpangan Keadilan

20 Amrta Institute for Water Literacy.

Demi Keadilan Akses Air Bersih

22 Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA)

Pengelolaan Air Berbasis HAM dan Keadilan Hidrologis

24 Omah Munir

Menyemai Benih Kesadaran HAM

26 WALHI

Ekosida, Kejahatan Serius Terhadap Lingkungan Hidup

28 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

Melindungi Ekologi dan Masyarakat Adat

31

LAPORAN KEUANGAN

YAYASAN TIFA 2019

38

PROGRAM STRATEGIS

2020 - 2024

Yayasan Tifa dan para mitranya di Indonesia telah melalui sejumlah peristiwa besar sepanjang 2019.

KATA PENGANTAR

DEWAN PENGURUS YAYASAN TIFA



WIWIEK AWIATI
KETUA DEWAN PENGURUS
YAYASAN TIFA



Membangun masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, kesetaraan dan keadilan merupakan komitmen Yayasan Tifa selama ini. Keterbukaan, Kebinekaan, Kesetaraan dan Keadilan adalah empat pilar yang mengawal setiap program Tifa di tahun 2019. Upaya ini kami lakukan melalui kerjasama timbal balik (*mutual collaboration*) dengan para mitra masyarakat sipil dalam bentuk berbagai program dan kegiatan.

Pelaksanaan program-program Tifa sepanjang tahun 2019 menghadapi dinamika yang sangat menarik. Kita dihadapkan dengan situasi dimana untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan waktunya dengan pemilihan anggota Legislatif. Berbagai akses yang dimanfaatkan oleh semua pihak untuk menyuarakan aspirasi di tahun politik ini, berujung pada kondisi yang kurang menguntungkan masyarakat sipil. Maraknya *hoax* dan berita bohong yang menyebar di internet dan media sosial menambah beban terjadinya fragmentasi, kecurigaan bahkan saling tidak percaya di antara sesama masyarakat sipil.

Tifa mencermati perubahan besar dalam dinamika politik masyarakat Indonesia sepanjang 2019. Terjadi pergeseran pendulum era keterbukaan dan demokrasi, yang diperjuangkan sejak era reformasi 98. Dapat dilihat dari menguatnya ancaman terhadap kebebasan sipil dalam wujud kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis pro-demokrasi yang bersuara kritis, pelemahan terhadap upaya anti korupsi, munculnya peraturan perundangan yang mengancam lingkungan dan sumber daya alam,

sampai pada terjadinya kembali tindakan kekerasan dan represi aparat terhadap massa aksi.

Tahun 2019 juga memperlihatkan gerakan-gerakan generasi muda yang turut memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil, menuntut akuntabilitas dan transparansi pemerintah, dan menjaga pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 2020-2024 juga memperlihatkan adanya kesadaran Pemerintah akan ketimpangan dalam masyarakat, permasalahan gender dan perlunya menghapus aturan-aturan diskriminatif yang menjadi ancaman dalam keberagaman Indonesia dan kelompok minoritas rentan. Secerach harapan yang seyogyanya dapat dipelihara dan terus diperjuangkan.

Perubahan akan selalu terjadi, baik itu yang bersifat konstruktif maupun yang perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan demokrasi. Tifa telah merancang program-program strategis untuk tahun 2020-2024 mengantisipasi perubahan ini. Program yang dihasilkan dari rencana strategis ini disusun sebagai panduan untuk beradaptasi menghadapi dinamika sosial-politik dan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Pada akhirnya kami ingin mengucapkan selamat membaca dan mencermati laporan tahunan Yayasan Tifa 2019. Kami senantiasa mempraktikkan prinsip tata-kelola yang baik (*good governance*) dengan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada semua pihak, khususnya jaringan dan mitra-mitra Yayasan Tifa.

KATA PENGANTAR

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN TIFA

●●●
SHITA LAKSMI
DIREKTUR EKSEKUTIF
YAYASAN TIFA



Menyongsong perubahan Yayasan Tifa di Januari 2020, pada akhir 2019, Yayasan Tifa melakukan perubahan program serta struktur organisasi di tingkat tim eksekutif. Perubahan ini bertujuan mengakselerasi langkah-langkah Yayasan Tifa ke depan dalam menggalang sumberdaya berbasis pengetahuan (*knowledge based resources*) untuk mewujudkan nilai-nilai keterbukaan, kebinekaan, kesetaraan dan keadilan bersama para mitra masyarakat sipil Indonesia.

Pada akhir 2019, Yayasan Tifa memiliki tim eksekutif beranggotakan 12 orang, namun perombakan struktur baru di awal 2020 dilakukan untuk memperkuat kantor eksekutif. Struktur ini diharapkan bisa berfungsi lebih lincah, responsif dan relevan pada bidang masing-masing, seperti penguatan masyarakat sipil, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), data digital dan tata kelola internet, manajemen keuangan dan dana hibah, pengembangan jaringan lintas sektor, dan lain-lain.

Akhir tahun 2019, tim eksekutif Yayasan Tifa menggulirkan program-program bertajuk Inovasi Gerakan Sosial dan Pendalaman Demokrasi, Penguatan Masyarakat Sipil dan Pengarusutamaan HAM, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Menghormati HAM, serta Transparansi dan Akuntabilitas Ekosistem Data Digital. Tema besar ini dioperasionalkan melalui program-program yang dilakukan bersama organisasi mitra.

Sepanjang 2019, program-program yang dijalankan oleh mitra sebagian besar berada pada tema transparansi dan kesetaraan, yang semuanya bertujuan meraih keadilan (*justice*). Partisipasi masyarakat menjadi kata kunci bagi Tifa dan para mitra untuk mencapai sasaran program-programnya, sekaligus melakukan perubahan.

Sebab itu, laporan tahunan ini memberikan tekanan lebih pada pentingnya mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik di tingkat nasional maupun lokal. Partisipasi masyarakat, Tifa pandang masih menjadi tantangan berat di tahun ini serta lima tahun mendatang, terlebih ketika negara semakin terkooptasi oleh kepentingan korporasi dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan yang semakin meminggirkan peran serta masyarakat dan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan.

Perlu dicatat pula, tantangan yang muncul selama menjalankan program 2019 ialah terjadinya pandemi COVID-19. Sejumlah program yang dimulai tahun 2019 dan masih berjalan hingga awal 2020, harus menyesuaikan dengan situasi pandemi dengan mengalihkan pertemuan tatap muka dan diskusi kelompok terfokus ke ranah virtual. Kondisi ini juga membuat Tifa dan para mitra semakin intensif berkampanye di media sosial. Situasi ini, di sisi lain, dapat memperluas daya jangkau hingga adanya kemudahan mengedukasi generasi lebih muda dengan nilai-nilai Tifa di dunia digital.

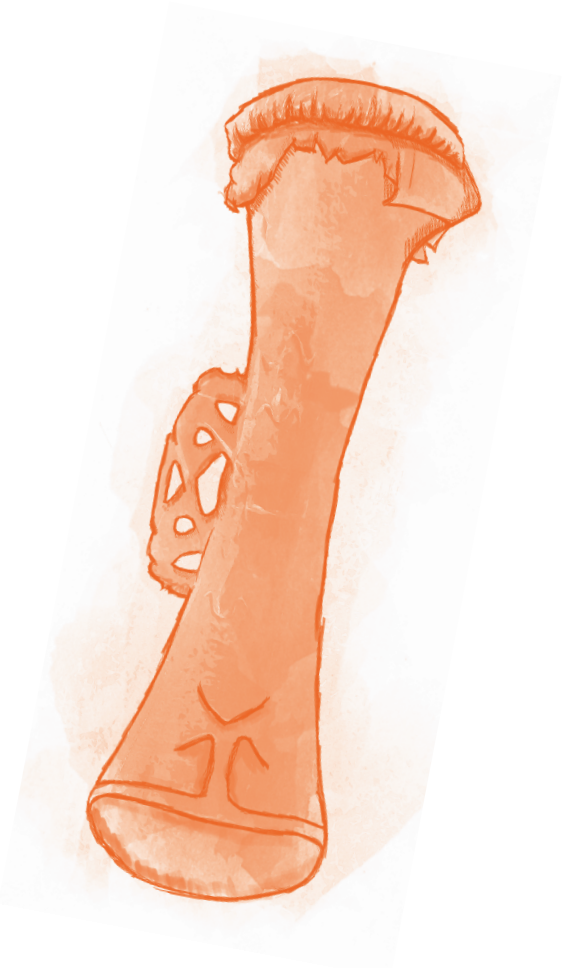


B E R P A R T I S I P A S I **U N T U K K E A D I L A N**

Yayasan Tifa menilai partisipasi masyarakat sipil sangat penting untuk terus dikonsolidasikan, sebagai jalan strategis untuk meraih keadilan, kesetaraan serta keterbukaan. Betapa penting partisipasi masyarakat sipil dapat dilihat sepanjang 2019, dan masih akan tetap strategis untuk tahun-tahun mendatang.



TENTANG YAYASAN TIFA



FILOSOFI TIFA

Nama organisasi ini, Tifa, diambil dari nama sebuah alat musik pukul serupa gendang yang digunakan oleh masyarakat adat di wilayah timur Indonesia untuk memanggil warga sekitar agar turut serta dalam pertemuan dan acara-acara adat lainnya. Alat musik ini juga digunakan oleh masyarakat adat untuk menyebarkan pesan damai dan keharmonisan.

Yayasan Tifa adalah organisasi masyarakat sipil Indonesia yang mempromosikan terwujudnya masyarakat yang terbuka, setara, beragam, dan adil melalui kerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Yayasan Tifa didirikan pada 8 Desember 2000 oleh 13 tokoh masyarakat sipil, yaitu Hadi Soesastro, Felia Salim, Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Bambang Widjodjanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatim, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chusnul Maryiah, dan Smita Notosusanto.

Sejak berdiri hingga saat ini, Tifa terus berupaya mendorong penguatan peran masyarakat sipil dalam perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan marginal, perluasan hak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat, advokasi bagi perwujudan media yang bebas, perbaikan tata kelola pemerintahan serta transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, serta sejumlah program lain yang selaras dengan upaya mewujudkan masyarakat terbuka di Indonesia.

Berkat program-programnya bersama para mitra di berbagai wilayah, Yayasan Tifa kini menjadi salah satu aktor penting di Indonesia dalam upaya mendorong terciptanya masyarakat terbuka, setara, beragam, termasuk peningkatan kualitas demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.

VISI

Yayasan Tifa memiliki visi

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT
TERBUKA YANG BERKHIDMAT
KEPADA KEBINEKAAN,
KESETARAAN, DAN KeadILAN.”**

NILAI – NILAI YAYASAN TIFA

Yayasan Tifa merumuskan empat nilai sebagai turunan visi organisasi dan sebagai landasan pelaksanaan program-program Yayasan Tifa. Empat nilai tersebut adalah:

1

KETERBUKAAN

Diartikan sebagai sifat atau kondisi tidak adanya rahasia, apa adanya, bersedia menerima masukan, toleran, dan sejenisnya. Dalam ketatanegaraan, negara terbuka adalah negara yang pemerintahannya tidak menutup diri, transparan, serta terbuka terhadap kritik dan saran pembaruan. Dalam masyarakat terbuka, warga bebas mengemukakan pendapat, ide, kritik, dan pada saat yang sama, warga juga siap menerima masukan untuk perbaikan.

2

KEBINEKAAN

Diartikan sebagai sebuah tatanan yang tidak didominasi oleh tata nilai, titik pandang, maupun pola pikir dan sikap suatu kelompok tertentu di mana keberagaman diakui dan dihargai. Masyarakat yang berkhidmat kepada kebinekaan adalah masyarakat yang bukan hanya mengakui perbedaan, melainkan juga melihat keberagaman (sosial-budaya, agama, ras, pandangan politik, dan lainnya) sebagai suatu aset, nilai tambah, dan kekuatan.

3

KESETARAAN

Diartikan sebagai situasi di mana setiap warga memiliki status dan hak yang sama di mata hukum. Masyarakat yang setara berupaya menghapuskan diskriminasi berbasis gender, agama, sosial-ekonomi, mayoritas-minoritas, elit-non elit, kaya-miskin dan lain-lainnya, sehingga setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara, termasuk dalam hal ini adalah memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang layak, dan hak dasar lainnya.

4

KEADILAN

Diartikan sebagai sifat ketidakberpihakan. Negara yang menjunjung keadilan adalah Negara yang memenuhi dan melindungi hak dan kewajiban setiap warganya, serta tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap warganya.

STRUKTUR YAYASAN TIFA 2019

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Tifa memiliki empat organ utama di dalam struktur organisasinya, yaitu Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan Tim Eksekutif.

Dewan Pembina Yayasan Tifa dipimpin oleh Felia Salim, beranggotakan tiga pendiri organisasi: Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, dan Goenawan Mohammad.

Sejak Juli 2019, posisi Dewan Pengawas diketuai oleh Delima Kiswanti menggantikan Lukas Luwarso yang menjabat sejak 2017. Sementara itu, Wiwiek Awiati menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa menggantikan ketua sebelumnya, Rizal Malik. Di Badan Pengurus, Wiwiek dibantu oleh Jacklevyn Frits Manuputty, Tri Nuke Pudjiastuti, Endy Bayuni, dan Ani Soetjipto.

Shita didukung oleh 12 orang anggota tim eksekutif. Mereka adalah Nova Fransisca Silitonga sebagai *Program Manager*, Sudaryanto dan Donny Ardyanto sebagai *Program Officer*, dan Nurlia Wuliyanti sebagai *Grants Officer*.

Selain itu, An Nisa Tri Astuti dan Intan Fatma Dewi sebagai *Program Assistant* dan Nur Zairida sebagai *Grant Assistant*, Dennis Tjandra sebagai *Finance Manager*, Bernadetha Chelvi Yuliasuti sebagai *Acting Office Manager*, Roy Linanda sebagai *Finance Officer*, Supri Hartini sebagai *Finance Assistant*, dan Harry Rizky sebagai staf *Information and Communications Technology (ICT)*.



PROGRAM YAYASAN TIFA 2019

Sepanjang 2019, Yayasan Tifa mencatat masyarakat sipil Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Setelah proses demokrasi berupa pemilihan anggota legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terlaksana, negara yang didukung oleh partai politik pendukung pemerintah secara perlahan melakukan konsolidasi kekuasaan melalui sejumlah undang-undang dan kebijakan.

Sebagai tahun Pemilu, tahun 2019 merupakan tahun politis yang penting karena adanya perubahan dinamika masyarakat Indonesia dan peta pergerakan sosial. Terbelahnya suara masyarakat antara kubu partai penguasa dengan oposisi dikhawatirkan memicu potensi konflik horisontal. Selain itu, rumitnya teknis pelaksanaan Pemilu telah mengakibatkan 894 petugas pemilu meninggal dunia dan 5.175 orang lainnya sakit, mengutip data Komisi Pemilihan Umum (Kompas.com, 22/1/2020).

Sebagai organisasi yang menjunjung keterbukaan serta bekerja untuk memajukan demokrasi di Indonesia, Yayasan Tifa mendorong organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif mewujudkan politik elektoral yang bersih. Setidaknya, ada empat agenda yang didorong oleh Yayasan Tifa. Yakni mencegah korupsi politik dan penggunaan politik uang, mendorong akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pemilu, meredam penggunaan ujaran dan hasutan kebencian terhadap kelompok minoritas, dan menjaga netralitas militer dan kepolisian dalam proses pemilu.

Sepanjang 2019, Yayasan Tifa mencatat bahwa ada penurunan pelaksanaan hak atas informasi dan kebebasan berekspresi, melalui adanya pelambatan sambungan internet di Jakarta. Bahkan terjadi pemutusan koneksi internet selama beberapa hari pada Agustus dan September 2019.

Yayasan Tifa hadir di Papua dengan mendukung gerakan masyarakat sipil di antaranya Lembaga Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari untuk program monitoring HAM dan pemberdayaan perdamaian di Papua Barat; Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) untuk penguatan terhadap konsep dialog yang inklusif dan upaya penyelesaian

permasalahan HAM guna membangun Papua Tanah Damai. Tifa mendukung Papuan Voice untuk mendokumentasikan peristiwa penting di Papua, termasuk dukungan hukum kepada kasus hukum yang dihadapi anggota Papuan Voices dan Pusaka untuk program perlindungan pembela HAM lingkungan dan masyarakat adat.

Di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam, Yayasan Tifa mendukung Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam mendorong perwujudan dari hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia seperti dimandatkan Pasal 28H Undang-undang Dasar 1945, sehingga kejahatan terhadap lingkungan hidup diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan hak asasi manusia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperluas diskursus Ekosida; perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan secara sengaja dan/atau karena kelalaian melalui berbagai aktivitas manusia yang membahayakan kehidupan manusia.

Perumusan konsep ekosida dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan merupakan hal yang mendasar. WALHI mengkaji beberapa kasus lingkungan hidup besar yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian ditinjau melalui kaca mata ekosida. Melalui pengkajian kasus-kasus tersebut, didapatkan benang merah peran korporasi dalam proses perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kemudian di isu kesetaraan, salah satu mitra Yayasan Tifa, yaitu Amrta Institute for Water Literacy, gencar berkampanye mengenai hak atas air yang didahului dengan serangkaian riset dan dilanjutkan advokasi kepada legislatif dan pemerintah pusat termasuk kampanye melalui media sosial. Rangkaian advokasi dan kampanye tersebut dilakukan selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) pada 2018 hingga RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang pada 17 September 2019.

Yayasan Tifa terus memainkan peran penting dalam mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya di wilayah Aceh, melalui dukungan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh serta mitra-mitra lokal seperti KontraS Aceh, LBH Aceh,

Asia Justice and Rights (AJAR) and Yayasan Pulih Aceh. Dukungan yang diberikan adalah upaya-upaya pencarian kebenaran melalui pengumpulan pernyataan, rekonsiliasi dan reparasi mendesak, serta pemulihan psikososial korban dan aktivis hak asasi manusia.

Selain itu, Yayasan Tifa juga mendorong upaya konsolidasi dukungan dan komitmen pemerintah pusat dalam proses rekonsiliasi di Aceh dan di tingkat nasional, dengan melakukan pendekatan kepada Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Tahun 2019 juga merupakan tahun terakhir untuk program Legal Empowerment Network Strategy (LENS), yang banyak melakukan advokasi bagi penguatan akses terhadap bantuan hukum di tingkat nasional dan lokal. Salah satu capaiannya ialah kegiatan MaPPI FHUI mengenai survei kebutuhan bantuan keadilan di Lampung dan Sulawesi Selatan, yakni pengembangan perangkat peninjauan dan pengukuran atas kebutuhan bantuan hukum dan masalah keadilan yang dihadapi oleh masyarakat.

Melihat dinamika yang terjadi selama 2019, Yayasan Tifa menilai partisipasi masyarakat sipil sangat penting

untuk dikonsolidasikan. Partisipasi sebagai jalan penting untuk meraih keadilan sepanjang tahun 2019, juga pada tahun-tahun mendatang. Secara umum, dukungan Yayasan Tifa kepada para organisasi mitra tersebar di empat klaster sesuai dengan nilai-nilai Tifa, yakni Keadilan, Keterbukaan, Kesetaraan, dan Kebinekaan. Melihat program-program yang dijalankan para mitra Tifa pada 2019, sebagian besar berada di klaster keadilan (*justice*), di samping tiga klaster lainnya, yakni kesetaraan, keterbukaan, dan keberagaman. Cerita dan proses pelaksanaan program para mitra dapat dibaca pada laporan tahunan ini.

Penguatan program-program pada klaster keadilan pada 2019 sejalan dengan analisis Yayasan Tifa, bahwa selama tahun 2017-2019, ketimpangan ekonomi semakin melebar dan intoleransi serta ketidakadilan terhadap kelompok minoritas dan marjinal di Indonesia akan semakin meningkat. Analisis program tersebut telah menjadi dasar persetujuan pemberian dana hibah pada 2019, maupun pada 2020.

Selama tahun 2017 hingga 2019, Yayasan Tifa membagi programnya ke dalam tiga kelompok tema dan sub-tema sebagai turunannya, yaitu:

PENGEMBANGAN & TATA KELOLA EKONOMI

- Penguatan tata kelola ekonomi di tingkat lokal
- Pelayanan publik yang inklusif

PENEGAKAN HUKUM & REFORMASI SISTEM PERADILAN

- Akses terhadap keadilan
 - Bantuan hukum dan paralegal
 - Perlindungan buruh migran
 - Perlindungan terhadap hak kelompok agama minoritas
- Keadilan transisi
 - Dukungan bagi proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh
 - Dokumentasi dan pembacaan ulang kasus pelanggaran HAM di masa lalu

PENDALAMAN DEMOKRASI & PARTISIPASI INKLUSIF

- Dukungan bagi terwujudnya Papua yang damai dan berkeadilan
- Kebebasan berekspresi

KETIMPANGAN EKONOMI SEMAKIN MELEBAR, INTOLERANSI DAN KETIDAKADILAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DAN MARJINAL DI INDONESIA AKAN SEMAKIN MENINGKAT

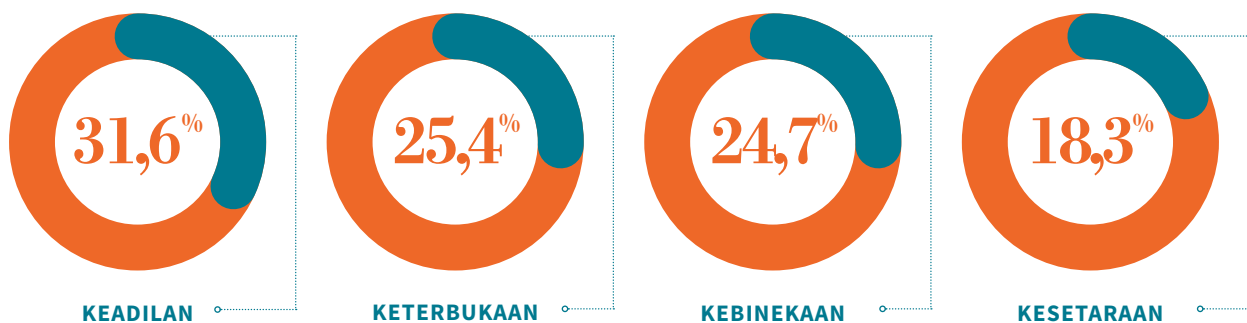
DISTRIBUSI DANA HIBAH 2019

Sepanjang 2019, Yayasan Tifa mendistribusikan dana hibah senilai Rp 38,08 miliar untuk empat klaster tema sesuai nilai-nilai Yayasan Tifa: Keadilan, Keterbukaan, Kesetaraan, dan Kebinekaan.

Alokasi dana terbesar atau 31,6 persen didistribusikan pada tema Keadilan dengan menggandeng 11 mitra. Kemudian disusul Keterbukaan dengan porsi 25,4 persen dengan 10 mitra, kebinekaan 24,7 persen dengan 8 mitra serta Kesetaraan 18,3 persen pada 6 mitra.

Melalui distribusi dana hibah tersebut, Yayasan Tifa mendukung kerja organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Distribusi dana tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Papua.

Upaya itu untuk memperkuat dukungan bagi pendalaman demokrasi, memperluas akses bantuan hukum bagi kelompok miskin di daerah-daerah, memperkuat perlindungan bagi kelompok minoritas serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, melalui penelitian, advokasi, lobi serta penguatan kelembagaan.



KEADILAN

RP **12,02**
MILIAR

- KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN KEKERASAN (KontraS) JAKARTA

- LBH BANDA ACEH

- ASIA JUSTICE AND RIGHTS (AJAR)

- KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KontraS) ACEH

- YAYASAN PULIH ACEH

- YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) JAKARTA

- LBH BANDAR LAMPUNG

- LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR

- IMPARSIAL

- PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI)

- MASYARAKAT PEMANTAU PERADILAN INDONESIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (MAPPI FHUI)/INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)



KETERBUKAAN

RP 9,69
MILIAR

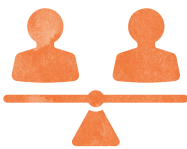
- **INDONESIAN PARLIAMENTARY CENTER (IPC)**
- **INDONESIA BUDGET CENTER (IBC)**
- **YAYASAN THE CONVERSATION INDONESIA**
- **SINDIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI (SPD)**
- **LEMBAGA PENELITIAN, PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN BANTUAN HUKUM (LP3BH) MANOKWARI**
- **PARAHYANGAN CENTER FOR DEMOCRACY AND PEACE STUDIES**
- **PERKUMPULAN PAPUAN VOICES**
- **LOKATARU FOUNDATION**
- **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGURUS PUSAT GERAKAN PEMUDA ANSOR (LBH ANSOR)**
- **ALIANSI DEMOKRASI UNTUK PAPUA (ALDP)**



KEBINEKAAN

RP 9,4
MILIAR

- **SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA (SBMI)**
- **YAYASAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI HAK ASASI MANUSIA**
- **ARDHANARY INSTITUTE**
- **YAYASAN MUSEUM HAM OMAH MUNIR**
- **PERKUMPULAN GAYA WARNA LENTERA INDONESIA (GWL INA)**
- **SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**
- **PERKUMPULAN ARUS PELANGI**
- **PERKUMPULAN SUARA KITA**



KESETARAAN

RP 6,95
MILIAR

- **YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT**
- **LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)**
- **WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**
- **KOALISI RAKYAT UNTUK HAK ATAS AIR (KruHA)**
- **FOUNDATION FOR INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS REPORTING STANDARDS (FIHRRST)**
- **INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT (IRE) YOGYAKARTA**

JUMLAH **RP 38,08** MILIAR





MENDORONG KETERBUKAAN, MEWUJUDKAN KEADILAN

Yayasan Tifa bersama mitra-mitranya melanjutkan program-program seputar keterbukaan (*transparency*) bagi para penyelenggara negara di level nasional dan daerah, akses keadilan bagi masyarakat marjinal, hingga mengadvokasi kelestarian lingkungan dari ancaman ekosida. Berikut ini gambaran dan cerita lebih dalam seputar program dan aktivitas beberapa mitra Yayasan Tifa sepanjang 2019 hingga awal 2020.



Cirebon

Indonesia Budget Center

MENDORONG TRANSPARANSI ANGGARAN DI DAERAH



Indonesia Budget Center (IBC) bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Transparency International Indonesia (TII), dengan dukungan Yayasan Tifa, mendorong inisiatif *Open Parliament* dengan mengupayakan keterbukaan informasi publik khususnya proses-proses legislasi dan akuntabilitas dan mekanisme reses pada anggota dewan baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD). Di tingkat lokal, IBC mengkordinir proyek untuk mendorong inisiatif *Open Parliament* di tingkat lokal (DPRD), serta meningkatkan partisipasi warga dalam proses-proses yang terjadi di lembaga perwakilan di daerah.

Secara spesifik, IBC dan jaringannya fokus pada upaya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. IBC memilih mengawal proses reses karena kegiatan itu merupakan salah satu kegiatan rutin di DPRD untuk mendekatkan anggota dewan dengan konstituennya. Di DPRD Kabupaten Cirebon, setiap anggota DPRD mendapatkan anggaran reses sebesar Rp 121,2 juta per tahun per orang untuk menyelenggarakan tiga kali reses. Secara keseluruhan anggaran reses sebesar Rp 6,06 miliar untuk 50 orang anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi program dengan pertimbangan adanya kesediaan kerja sama dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi dengan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Cirebon sebesar 10 kursi; adanya dukungan lintas fraksi; adanya jaringan pada pengurus ormas Nahdlatul Ulama (NU) Cirebon dan pimpinan pondok pesantren di Cirebon; dan adanya

komitmen pimpinan DPRD untuk mengadopsi prinsip *Open Parliament* dan antikorupsi di DPRD Kabupaten Cirebon.

Strategi dan gagasan penting yang dijalankan oleh IBC ialah memperluas akses informasi bagi masyarakat Kabupaten Cirebon tentang pelaksanaan reses anggota DPRD; mengembangkan mekanisme akuntabilitas dan kinerja reses anggota DPRD; dan memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi warga terhadap penyerapan anggaran DPRD. IBC kemudian memfasilitasi pembuatan E-Reses sebagai media penghubung antara anggota DPRD dengan masyarakat, khususnya konstituen.

IBC dan konsorsium memantau tiga anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB yang bersedia bekerja sama dengan program ini, yakni Muhammad Luthfi, M.Si (Ketua DPRD Kab. Cirebon), H. R Hasan Basori, S.E, M.Si dan Dr. Hj. Hanifah, M.A. Bersama mereka, IBC menerapkan



• Diskusi publik hasil riset IBC mengenai transparansi dan akuntabilitas dana reses DPRD, Cirebon, 10 Desember 2019. (foto: IBC)

sejumlah instrumen transparansi yang didesain oleh konsorsium dan dibahas dengan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon.

Pemantauan dilakukan di empat desa yang mengikuti jadwal reses anggota DPRD mitra program IBC di Kabupaten Cirebon. Pengelolaan komunikasi yang baik dengan konstituen saat reses, dicontohkan oleh Hasan Basori, anggota termuda di DPRD Kabupaten Cirebon. Setiap turun ke konstituen di daerah pemilihannya, dia selalu memakai media yang mudah dipahami masyarakat seperti video, sehingga konstituen juga tertarik mengikuti kegiatan reses.



• Roy Salam: Direktur IBC, Roy Salam diwawancarai wartawan terkait rencana kenaikan anggaran DPR hingga 70 persen . (Foto: IBC)

KEGIATAN IBC

Berikut ini sejumlah kegiatan yang digelar oleh IBC untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Open Parliament* di DPRD Kabupaten Cirebon:

- Menggelar pertemuan strategis di Jakarta dengan sejumlah mitra lokal di Kabupaten Cirebon: anggota DPRD, Sekretariat Dewan, tokoh masyarakat dan agama serta pemuda.
- Melakukan riset akuntabilitas dan transparansi DPRD Kabupaten Cirebon dan menyusun Panduan Pelaporan Dana Reses yang melibatkan beberapa jaringan NGO (*non*

government organization) dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

- Penyusunan *platform* E-Reses DPRD Kabupaten Cirebon yang efektif dan transparan sekaligus mengoptimalkan *website* DPRD Kabupaten Cirebon, termasuk dengan menggunakan teknologi informasi. *Platform* E-Reses didesain dengan mencantumkan profil anggota, agenda reses, laporan kegiatan, dan usulan masyarakat.
- Penyusunan Panduan Kegiatan reses bagi Anggota DPRD dan staf pendukung dengan mengadopsi prinsip-prinsip *Open Parliament*.

Buku manual reses segera diserahkan kepada Sekretariat Dewan DPRD untuk digunakan oleh semua anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Sedangkan aplikasi atau portal E-Reses sedang diperbaiki dengan *server* baru, karena *server* yang digunakan sebelumnya tidak berfungsi dengan baik.

Salah satu capaian penting program ini ialah terbentuknya jaringan IBC dengan pimpinan ormas dan pondok pesantren di Cirebon bernama Jaringan Masyarakat Pemantau Anggaran Cirebon (Jamac). Sejumlah lembaga yang terlibat di dalamnya adalah Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU), Fatayat NU, ISNU, IPNU, KNPI, Media dan Forum Kyai. Deklarasi Jamac terbentuk setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra oleh KPK pada 2018. Program ini mendorong partisipasi rakyat untuk mengawasi anggaran dan upaya mencegah korupsi.



Program: Mempromosikan *Open Parliament* di Tingkat Lokal: Membangun Kontrol Warga melalui Transparansi dan Akuntabilitas Reses DPRD **Lokasi Program:** Kabupaten Cirebon, Jawa Barat **Organisasi:** Indonesia Budget Center (IBC) **Situs Resmi:** daulatanggaran.com

Capaian lainnya ialah terbentuknya forum pertemuan masyarakat Cirebon yang disebut Ngaji Anggaran. Semula IBC ingin menggelar semacam sekolah anggaran agar masyarakat Cirebon melek anggaran. Namun, rencana itu diterjemahkan oleh organisasi jaringan IBC menjadi Ngaji Anggaran. Dalam pertemuan itu, para peserta mengikuti pengajian rutin agama, namun dilanjutkan dengan membahas sejumlah hal terkait anggaran pemerintah daerah maupun DPRD. Kegiatan Ngaji Anggaran telah dilaksanakan di 30 desa, tak kurang 300 orang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Jamac dan para kyai ini.



Indonesian Parliamentary Center MEWUJUDKAN PARLEMEN TERBUKA DAN AKUNTABEL

Indonesian Parliamentary Center (IPC) bersama dengan Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Budget Center (IBC) mendorong keterbukaan (*transparency*) dalam institusi parlemen Indonesia baik di tingkat pusat (DPR) dan di tingkat lokal (DPRD).

Pentingnya mendorong inisiatif “*open parliament*” ini tercermin dari survei yang dilakukan oleh IPC dan koalisi pada Agustus 2019 terhadap sekitar 100 responden di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Suara responden bulat menghendaki adanya transparansi dalam setiap proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hasil survei itu antara lain menghendaki dibukanya laporan harta kekayaan negara (LHKPN) atau deklarasi aset anggota DPR ke publik. Serta proses lainnya di DPR RI, antara lain memonitor proses legislasi dan persidangan-persidangan yang berlangsung di DPR RI.

Responden juga meminta keterbukaan daftar hadir sidang para anggota DPR. Begitu pula keterbukaan informasi tentang jadwal dan agenda reses, laporan kegiatan reses hingga aset anggota DPR yang dibiayai negara, aset dan anggaran lembaga DPR, serta usulan dan

hasil prolegnas. IPC telah mempresentasikan hasil survei itu kepada DPR pada 29 Januari 2020.

Survei tersebut memperteguh keinginan IPC dan koalisi untuk terus terlibat dan mendukung terwujudnya “*open parliament*” di DPR RI. Setelah melalui sejumlah kerja sama dan dialog, IPC mendapatkan kepercayaan untuk membentuk sekretariat dan struktur *Open Parliament* Indonesia di gedung pimpinan DPR RI.

Selain itu, IPC bersama koalisi berhasil mendorong penyusunan panduan reses bagi DPR RI yang lebih transparan dan akuntabel, bersama pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi, pada Agustus 2019. Panduan tersebut selanjutnya siap digunakan oleh pimpinan fraksi dan anggota DPR pada April 2020.



Program: Mempromosikan *Open Parliament* di Indonesia **Lokasi Program:** DKI Jakarta dan Cirebon, Jawa Barat **Organisasi:** Indonesian Parliamentary Center (IPC) **Situs Resmi:** www.ipc.or.id



• Taman Nusantara di kompleks Gedung DPR MPR RI di Jakarta



Suara responden bulat menghendaki pentingnya deklarasi aset para anggota DPR dibuka ke publik

Namun pada awal Maret 2020, wabah COVID-19 menyeruak, sehingga rencana tersebut tertunda. Saat ini, IPC menerapkan beberapa gagasan baru untuk menyesuaikan panduan reses di masa pandemi COVID-19.

IPC bersama koalisi juga mendorong penerapan sistem tata kelola informasi meliputi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sistem informasi legislasi (Sileg) yang mampu merespons kebutuhan publik. Dalam proses ini, IPC memberikan asistensi pengembangan situs resmi DPR RI, dpr.go.id, dengan menambahkan kanal khusus tentang berbagai informasi terkait proses legislasi.

Keberhasilan lain ialah IPC bersama koalisi dapat mendorong penerapan keterbukaan informasi di dalam struktur dan birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Mulai dari pembuatan kanal PPID hingga mendorong keterbukaan informasi di banyak unit organisasi DPR RI. Setiap unit tersebut kemudian diikutkan dalam kompetisi internal keterbukaan informasi, di mana IPC ikut menjadi salah satu jurinya.

Dampak yang cukup menggembirakan ialah munculnya inisiatif keterbukaan informasi di setiap unit organisasi DPR RI. Salah satunya di setiap komisi DPR RI saat ini selalu dibuat laporan singkat dan risalah rapat, dan dimuat di situs resmi DPR (lihat contoh tautan ini: <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Laporan-Singkat-Komisi-XI>)

Selain itu, IPC dan koalisi menyusun *Policy Paper* tentang sistem tata kelola informasi yang di dalamnya terdapat rekomendasi mekanisme dan tata kelola data dan informasi di parlemen. *Policy Paper* tersebut telah disampaikan ke DPR pada awal 2020.

Capaian keberhasilan IPC dan koalisi hingga pembentukan sekretariat dan struktur *Open Parliament* Indonesia yang dijabat oleh Kepala Biro Pimpinan DPR RI dan tenaga ahli, penyusunan rencana aksi *Open Parliament* Indonesia, serta pembentukan tim *Open Parliament* Indonesia yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR.

Tidak dilupakan pula, IPC dan koalisi gencar mempublikasikan gagasan *Open Parliament* di situs resmi openparliament.id dan media sosial Twitter (@pusatparlemen) dan Instagram ([ipc-pusatparlemen](https://www.instagram.com/ipc-pusatparlemen)). Materi kampanye yang diunggah di akun-akun media sosial IPC seputar kegiatan diskusi daring, hasil-hasil pemantauan transparansi parlemen, 30 material kampanye (buku, poster, infografis) hingga konferensi pers.

SEJUMLAH CAPAIAN IPC

- Terlembagakannya *Open Parliament* Indonesia di DPR RI :
 - Pembentukan sekretariat dan struktur (Kepala Sekretariat *Open Parliament* Indonesia yang dijabat oleh Kepala Biro Pimpinan DPR RI dan ada Tenaga Ahli)
 - Penyusunan Rencana Aksi *Open Parliament* Indonesia
 - Pembentukan Tim *Open Parliament* Indonesia yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR.
- Diterimanya sebagian usulan IPC dan koalisi terkait sistem tata kelola data dan informasi DPR RI.
- Diterimanya sebagian usulan IPC dan koalisi terkait metode evaluasi implementasi keterbukaan informasi untuk mengukur kinerja transparansi alat kelengkapan parlemen.
- Adanya perubahan tampilan dan *content* pada Sistem Informasi Legislasi (Sileg) DPR RI dengan lebih baik, dilihat dari kemudahan *tracking* dokumen berdasarkan tahapan penyusunan undang-undang.
- Adanya saluran interaktif pada aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI dan penilaian kinerja keterbukaan informasi di unit-unit organisasi DPR RI.
- Terbentuknya situs openparliament.id, ini akan membantu DPR untuk membangun *engagement* dengan masyarakat/konstituen karena di *web* tersebut menyajikan data-data akses partisipasi ke anggota parlemen.

MaPPI FHUI MENGHAPUS KETIMPANGAN KEADILAN

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) – Indonesia Justice Research Society (IJRS) adalah sebuah lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang fokus di bidang penelitian hukum dan peradilan, sekaligus ingin melindungi hak warga negara untuk memperoleh akses pada keadilan, dan meningkatkan partisipasi publik pada reformasi sistem peradilan.

Yayasan Tifa mendukung MaPPI FHUI melalui program *Legal Empowerment Network Strategy* (LENS) yang telah berlangsung sejak 2017. Pada periode proyek 2019-2020, MaPPI FHUI berupaya mendorong *evidence-based policy* dalam kebijakan bantuan hukum dan memperkuat akses terhadap keadilan melalui *pro bono* oleh advokat.

Survei Kebutuhan Hukum (*Legal Needs Survey*) adalah salah satu inisiatif yang dijalankan oleh MaPPI FHUI pada proyek 2019-2020 ini demi mewujudkan kebijakan bantuan hukum yang berbasis bukti. Sebagai sebuah cara untuk mendapatkan gambaran permasalahan hukum melalui perspektif pencari keadilan, inisiatif ini diharapkan dapat mendorong ketersediaan data kebutuhan hukum yang valid dan reliabel, serta menjadi rujukan bagi publik maupun pemerintah dalam menyusun intervensi atau kebijakan di sektor keadilan.

Survei ini bersifat umum dengan menasar *general population* di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat miskin dan marjinal; serta wilayah kabupaten/kota yang sudah/akan memiliki Perda Bantuan Hukum.

Penyusunan desain survei dan instrumen penelitian dilakukan MaPPI FHUI bersama Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI. Sebagai sebuah alat (*tools*) untuk mendapatkan data kebutuhan hukum yang valid, MaPPI FHUI berusaha mendorong agar survei ini dapat diadopsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ke dalam Modul Ketahanan Sosial (Hansos) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sehingga

pengumpulan data dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, serta data yang ada dapat dipakai oleh pemerintah maupun masyarakat sipil untuk menyusun ataupun mengevaluasi kebijakan bantuan hukum. Selain itu, hasil survei juga dapat menjadi basis bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan kebijakan bantuan hukum di daerah dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu, inisiatif lainnya dalam proyek ini adalah E-Probono, yaitu sistem *pro bono* berbasis *web* untuk menjembatani advokat dan pencari keadilan (*justice seeker*) yang tidak masuk kategori penerima bantuan hukum, namun juga tidak mampu mengakses layanan pengacara dari firma hukum privat.

Inisiatif E-Probono berangkat dari hasil penilaian MaPPI FHUI terkait pelaksanaan *pro bono*—yang melibatkan 107 advokat sebagai responden. Temuan dalam asesmen tersebut adalah sebagian besar responden (86 persen) menyatakan bahwa mereka mengetahui apa itu *pro bono* (86 persen), serta pernah melakukan *pro bono* selama masa profesinya (87,9 persen), namun para advokat tersebut memiliki





- Asesmen Pengguna Sistem Pro Bono-Komunitas Sahabat Insan. (Foto: MaPPI FHUI)
- Survey LNS kepada Masyarakat. (Foto: MaPPI FHUI)



perspektif dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda mengenai kewajiban dan praktik *pro bono*.

Di sisi lain, motivasi mereka untuk terlibat dalam kerja-kerja *pro bono* masih sangat tinggi. Maka dari itu, sistem *pro bono* ini menjadi penghubung bagi advokat yang ingin melakukan kerja *pro bono* dengan pencari keadilan yang membutuhkan pendampingan hukum.

Dari kegiatan proyek yang dilaksanakan tersebut, MaPPI FHUI - IJRS telah mendapatkan sejumlah capaian positif:

- Dalam menjalankan proyek, baik terkait survei kebutuhan hukum maupun sistem *pro bono*, MaPPI FHUI membangun keterlibatan (*engagement*) dan diskusi yang intens dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- BPHN mendukung secara penuh dan siap berkolaborasi dengan masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan bantuan hukum berbasis bukti, serta menguatkan akses keadilan melalui sistem *pro bono* dan evaluasi layanan bantuan hukum.
- Terbentuknya panduan asesmen sistem *pro bono* berdasarkan data asesmen baik dari pencari keadilan (Ikatan Perempuan Positif/IPPI, Sahabat Insan, Suara Kita, PKNI & Tape Uli) maupun advokat dari firma hukum yang memiliki fokus isu *pro bono*

di Jakarta (IABF Law Group, Guido Hidayanto & Partners, Assegaf Hamzah & Partners, Melli Darsa & Co, Makarim & Taira S dan Ayub and Associate).

- Website e-probono.org sudah mencapai tahapan uji coba dan mendapat sambutan positif, karena dianggap sebagai terobosan untuk menjembatani kebutuhan pencari keadilan terhadap bantuan hukum dan kebutuhan advokat untuk melakukan kerja *pro bono*nya.

MaPPI FHUI-IJRS juga menemui sejumlah kendala dan tantangan dalam melaksanakan kegiatan yang telah dirancang, antara lain:

- MaPPI FHUI mencatat sejumlah kegiatan yang dirancang tetap dialihkan secara daring karena pandemi COVID-19
- Sulitnya mencari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, serta sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan hukum secara *pro bono*.
- Sistem E-Probono masih belum cukup mudah digunakan (*user friendly*) sehingga banyak hambatan bagi pengguna ketika mengakses ataupun menggunakan fitur yang ada.
- Belum ada kejelasan mengenai siapa pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk mengelola sistem E-Probono secara berkelanjutan.



Program: Survei Kebutuhan Keadilan (Legal Need Survey) di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan dan Pengembangan Sistem Pro Bono Bagi Organisasi Advokat di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan
Lokasi Program: DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan
Organisasi: MaPPI FHUI **Situs Resmi:** www.mappifhui.org

Amrta Institute for Water Literacy

DEMI KEADILAN AKSES AIR BERSIH

Amrta Institute gencar berkampanye soal hak asasi atas air bersih melalui advokasi peraturan perundang-undangan di pemerintah pusat dan daerah hingga melalui media sosial. Dalam setiap kampanyenya, Amrta selalu menyertakan data dan hasil riset yang mereka lakukan.

Amrta menyampaikan beragam pesan berbasis penelitian lapangan maupun studi dokumen kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Diantaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan sejumlah anggota DPR RI di Komisi V mengenai penghormatan hak asasi manusia, khususnya hak rakyat atas air oleh pelaku bisnis.

Advokasi dilakukan selama proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) pada 2018 hingga RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang pada 17 September 2019.

Selain itu, bersamaan dengan advokasi kebijakan, Amrta memproduksi materi kampanye bersifat *human interest* tentang hak-hak warga atas air bersih, melakukan investigasi lapangan, studi pustaka, dan mendiseminasikan hasil penelitian tersebut secara tertulis, melalui *website*, diskusi terbatas, hingga dalam bentuk film dokumenter serta infografis.

Pembuatan film dokumenter dilakukan dengan turun langsung ke lapangan pada Januari-April 2019 di Jakarta dan Sukabumi. Selanjutnya semua kampanye berupa video didistribusikan melalui akun *instagram.com/Indonesia.water* dan website *indonesia-water.id*.

Keseluruhan bahan untuk kampanye di media sosial dan *website* diperoleh dari hasil investigasi lapangan dan *desk research*. Investigasi lapangan dilakukan di Sukabumi (Jawa Barat), Pandaan (Jawa Timur) dan Jakarta.

Amrta melakukan investigasi lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap warga yang mengalami langsung buruknya layanan air di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan pada 2 April 2019. Hasil investigasi lapangan berupa laporan berjudul *Air Langka di Kota Sepuluh Juta Jiwa*. Di Sukabumi, investigasi lapangan dilaksanakan pada 2-5 Mei 2019.

Hasil investigasi dan analisis untuk masalah air di Jakarta diikutsertakan dalam kompetisi *Atlas of Utopias 2019*, inisiatif global untuk menunjukkan upaya masyarakat untuk memastikan akses air, energi, pangan,



• Masyarakat mencuci di sungai yang tidak terjamin kebersihannya.
(foto: Amrta)



”

Hasil temuan di lapangan akhir April 2019, warga Cengkareng menemukan cacing dalam aliran air yang dipasok perusahaan swasta penyedia air bersih di Jakarta Barat.

- Masyarakat Cengkareng, Jakarta Barat, menemukan cacing dalam air bersih pasokan dari perusahaan air swasta, April 2019. (foto: Amrta)

dan perumahan. Kasus Jakarta masuk sebagai dua besar yang terpilih dan ditampilkan di *website* dan dibuka bagi *vote* global untuk menentukan pemenangnya. *Launching* dilakukan pada 4 Juli 2019 www.transformativecities.org.

Direktur Amrta Institute, Nila Ardhanie, terpilih menjadi anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, tim khusus yang dibentuk oleh Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi terkait putusan Mahkamah Agung dan kebijakan air di Jakarta. Di tim tersebut, Amrta memperkuat perspektif hak atas air sekaligus memperbaiki kualitas maupun akses air bersih di Jakarta.

Selain investigasi lapangan, Amrta Institute melakukan *desk research* melalui studi pustaka dan pembuatan laporan dengan tiga topik utama: hak atas air dan sanitasi, proses pembahasan UU Sumber Daya Air, dan hak asasi dan bisnis. Hasil kajian tersebut dikemas menjadi publikasi populer melalui booklet dan bahan kampanye di media sosial.

Hasil *desk research* atau *desktop study* berupa empat buah publikasi dapat diakses di *website indonesia-water.id*. Publikasi secara digital di *website* itu cukup menarik perhatian masyarakat, terlihat dari jumlah kunjungan *website* dan halaman dilihat (*page views*) yang terus meningkat selama program berjalan hingga berakhir.



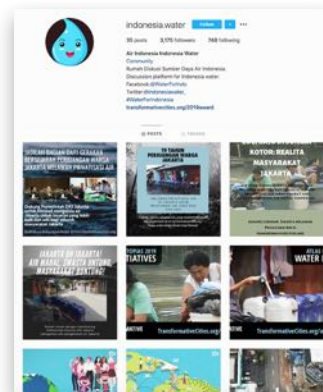
Program: Mengawal Isu Bisnis dan Hak atas Air dalam RUU Sumber Daya Air **Lokasi Program:** DKI Jakarta **Organisasi:** Amrta Institute for Water Literacy **Situs Resmi:** www.amrta-institute.org



MATERI KAMPANYE HAK ATAS AIR AMRTA

Tiga buah booklet dan sebuah *leaflet* sebagai media informasi populer yang merangkum hasil investigasi lapangan dan *desktop study* didistribusikan dalam bentuk digital:

- Hak atas Air dan Sanitasi <https://indonesia-water.id/3d-flip-book/human-right-to-water-and-sanitation/>
- Tarik Menarik Pengusahaan dalam UU Sumber Daya Air <https://indonesia-water.id/3d-flip-book/booklet-ruu-sda/>
- Hak Asasi dan Bisnis : Sebuah Pengantar di Sektor Air <https://indonesia-water.id/3d-flip-book/ham-dan-bisnis/>



Enam buah videografis dan video dokumenter pendek <https://www.instagram.com/indonesia.water/>

- Videografis Bisnis dan HAM
 - <https://www.instagram.com/p/BxgkkVWjCbE/>
 - <https://www.instagram.com/p/BxmBtvejeSP/>
 - <https://www.instagram.com/p/BqnBzGjBXcK/>
- Video dokumenter pendek "Aliran Air Jakarta Menghindari Warga Miskin" https://www.instagram.com/p/Bw_FdySDR3x/
- Video dokumenter pendek "Kesulitan Air Bersih Mengganggu Ibadah" https://www.instagram.com/p/Bw0-bH4D_Wc/
- Video dokumenter "Sulitnya Air Jakarta Beban Tambahan Kaum Perempuan" <https://www.instagram.com/p/BwwODffjDP9/>
- Video dokumenter Sukabumi seri 1 dan 2
 - https://www.instagram.com/p/Bqqlx6xB_uh/
 - <https://www.instagram.com/p/BqmF6gIhfBW/>
- Video dokumenter RUU Sumber Daya Air <https://www.instagram.com/p/BqqlamThIdG/>

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) PENGELOLAAN AIR BERBASIS HAM DAN KEADILAN HIDROLOGIS



• Sejumlah aktivis KruHA melakukan demonstrasi tentang hak atas air di Jakarta (Foto : KruHA)

KRuHA merupakan koalisi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan individu yang mencoba mengkritisi kebijakan sumberdaya air di Indonesia. KRuHA meyakini pandangan bahwa pemenuhan Hak atas Air dan Sanitasi serta hak-hak dasar lainnya adalah tanggung jawab utama negara. Pelimpahan kewenangan negara kepada sektor bisnis dan mengubah status barang publik menjadi barang komersial (komodifikasi dan komersialisasi sumber daya publik) adalah tindakan inkonstitusional dan pelanggaran HAM.

Sekadar catatan, organisasi nirlaba ini merupakan pemangku *legal standing judicial review* pada 2014 yang putusannya menjadi dasar gugatan *judicial review* pada 2014 (perkara no.85/PUU-XI/2013). Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menetapkan “syarat konstitusional” pengelolaan sumber daya air.

Dalam programnya bersama Yayasan Tifa, KRuHA merintis berdirinya sekolah hak atas air, membangun

jejaring lokal dan regional, hingga melakukan indeksasi hak atas air. Hingga saat ini, area kerja KRuHA berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Labuan Bajo, dan NTT.

Di Semarang, KRuHA memberikan kasus Masjid Layur, Semarang, sebagai fenomena penting krisis ekologis di kota itu. Masjid Layur adalah contoh kasus terjadinya penurunan tanah berkombinasi dengan peninggian atau penimbunan tanah. Pada 1990-an, lantai I masjid ini masih bisa digunakan, namun sekarang berada di bawah permukaan tanah, hanya menyisakan jendela yang terlihat di permukaan.

Kasus ini diungkap dalam kertas posisi “Maleh Dadi Segoro” Krisis Sosial-Ekologis Kawasan Pesisir Semarang-Demak, Jawa Tengah, yang disusun oleh Koalisi Pesisir Semarang-Demak. KRuHA, yang ikut terlibat dalam penyusunan kertas posisi itu, mengangkat lebih jauh krisis ekologis di Kota Semarang dan sekitarnya dalam kampanye yang dilakukan.

Dengan dukungan dana hibah dari Yayasan Tifa, KRuHA terus mendorong pelebagaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sumber daya air, antara lain melakukan indeksasi air sebagai proses penguatan layanan publik, dan keadilan hidrologis.

Lemahnya tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan dan sumber-sumber air, berlanjut pada ketidakmampuan negara memberikan layanan air bersih yang cukup dan berkualitas kepada masyarakat. Hanya 47 persen masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih. Bagi KRuHA, hal itu menjadi bukti tata kelola pengelolaan air di Indonesia yang buruk.

Sejak Agustus 2019, KRuHA gencar menyelenggarakan seminar indeksasi hak atas air di Bandung, Jawa Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Denpasar, Bali. Selain membangun ruang dialog kebijakan, seminar ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta yang berkaitan dengan pengelolaan air, khususnya pasca penetapan norma hak atas air dalam *judicial review* di MK.



• Seorang pria berwudhu di masjid Layur di Semarang (Foto : KRUHA)

”

Pada 1990-an, lantai I masjid Layur, Semarang, masih bisa digunakan, namun sekarang sudah berada di bawah permukaan tanah, hanya menyisakan jendela yang terlihat di permukaan

Secara paralel, KRUHA melakukan pemantauan terhadap proses-proses kebijakan yang berpengaruh signifikan pada sumber daya dan hak atas air di Semarang dan Purworejo, Provinsi Jawa Tengah; Banyuwangi, Mojokerto, Jombang, Provinsi Jawa Timur; Bandung, Bekasi, Padarincang, Jawa Barat; Kupang, Labuan Bajo, Mataloko dan Wae Sano Nusa Tenggara Timur; serta Bali.

Koalisi jejaring lebih dari 30 organisasi non pemerintah itu menyelenggarakan Sekolah Hak atas Air di Wadas, Bekasi, dan Bandung. Sebanyak 100 orang perwakilan komunitas dari 32 daerah di Jawa dan Bali dan 120 orang warga di Bekasi berbagi pengalaman, perhatian, dan pembelajaran yang kemudian diserap guna menyusun kurikulum Sekolah Hak atas Air.

KRUHA juga berjejaring di tingkat regional melalui *workshop* terkait submisi dan intervensi proses pembentukan instrumen internasional yang berkekuatan memaksa (*International Legally Binding Treaty*). Penyelenggaraan *workshop* di Jakarta, Bangkok, dan Manila melahirkan Asian Task Force, sebuah jaringan kampanye dan advokasi bisnis dan HAM yang berkoordinasi dengan *Global Campaign on Legally Binding Treaty on Business and Human Rights*. (*)



Program : Fase Lanjut Pelembagaan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sumber Daya Air: Indeksasi Sebagai Proses Penguatan Layanan Publik, Commons, dan Keadilan Hidrologis
Lokasi Program: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur **Organisasi:** Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) **Situs Resmi:** www.kruha.org



CAPAIAN AKTIVITAS KRUHA

01

Pembentukan Grup Lingkaran Belajar Panas Bumi, kelompok jejaring KRUHA bersama organisasi nirlaba lain seperti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sun Spirit, WALHI Jawa Timur dan organisasi lainnya. Jejaring ini dibentuk untuk menjangkau korban dampak proyek dan kebijakan pengelolaan air. Proses pemantauan meliputi Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Saat ini sedang dalam proses pengolahan temuan-temuan di lapangan.

Pemantauan meliputi dampak-dampak yang terjadi dari kekeringan, gempa bumi, tanah amblas, peracunan air dan tanah, *biodiversity lost*, rusaknya lapisan ozon, polusi termal (*thermal pollution*), semburan gas dan lumpur, krisis air tanah, dampak sosial, dan perampasan lahan produksi keluarga petani.

02

Pembentukan Koalisi Warga Pemantau Proyek Tol dan Tanggul Laut Semarang-Demak melalui kolaborasi dengan berbagai universitas, yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Sultan Agung dan lainnya, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Semarang, yang merupakan anggota pendiri KRUHA. Koalisi ini telah menyelesaikan sebuah kertas posisi berjudul "Maleh Dadi Segoro" yang mengombinasikan analisa sosial dan spasial dalam membaca gejala ketimpangan dan ketidakadilan dalam respons kebijakan terkait tata kelola air di Semarang, Demak dan sekitarnya.

03

Lahirnya jaringan korban ekstraktivisme hasil dari eksploitasi sumber daya alam. Jaringan yang lahir dari pertemuan di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah ini terbagi dalam tiga wilayah koordinasi, yakni Jawa Bagian Timur dan Bali, Jawa Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat. Masing-masing wilayah regional telah melakukan pertemuan lanjutan.

04

Jaringan *Asia Task Force of Legally Binding Treaty on Business and Human Rights* dan jaringan *Asia Pacific Gathering on Extractives and Human Rights*. Kedua jaringan regional ini akan membangun program-program strategis yang diharapkan bisa menjembatani proses promosi dan perlindungan pembela HAM, pengembangan kapasitas, dan kapabilitas komunitas korban. (*)



Omah Munir

MENYEMAI BENIH KESADARAN HAM

Yayasan Tifa membantu mengantar Omah Munir menjadi Museum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Meski berada di daerah, yakni di Kota Batu, Jawa Timur, Omah Munir berusaha menjadi museum bagi semua kalangan di Indonesia, tidak hanya bagi para aktivis HAM, juga bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum.

Museum ini didirikan pada 2013 dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang HAM melalui seorang Munir, sosok pejuang HAM dan demokrasi di Indonesia sepanjang hidupnya. Munir meninggal dunia di dalam pesawat dalam perjalanan menuju Belanda untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Munir tewas karena diracun oleh seseorang yang kemudian terbukti sebagai agen intelijen negara.

Omah Munir mendapatkan program bantuan dari Yayasan Tifa pada 2018 dan berlanjut pada 2019. Transformasi nilai-nilai HAM kepada berbagai organisasi masyarakat dan komunitas serta kelompok pelajar dan mahasiswa, menjadi salah satu keberhasilan Omah Munir.

Berikut ini capaian program yang dijalankan oleh pengurus museum Omah Munir, antara lain:

- Omah Munir bersama Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dengan dukungan Yayasan Tifa menggandeng para seniman menggelar kompetisi Seni Rupa Ruang Publik bertajuk Hak untuk Kehidupan Layak. Kompetisi ini mendapat sambutan luas dari publik dan para seniman besar. Tak kurang dari 80 seniman mengikuti kompetisi ini. Dengan banyaknya peserta, Omah Munir berupaya mengejawantahkan masalah-masalah HAM dalam kehidupan sehari-hari melalui karya para seniman. Kompetisi ini dimenangkan oleh Dessy Wahyuni dengan judul *Perjuangan, Tumbuh, dan Berkembang*.



• Kegiatan diskusi *pilot project* modul HAM untuk siswa di Jakarta (Foto : Omah Munir)

- Pembangunan gedung museum HAM baru, Omah Munir melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kota Malang dalam lomba desain pembangunan Museum Omah Munir. Proyek pembangunan gedung tiga lantai ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai donatur dan Pemerintah Kota Batu sebagai pihak yang membangun museum bersama Omah Munir. Keberhasilan Omah Munir melibatkan institusi negara membutuhkan proses panjang dan tak mudah, di antaranya mengajak mereka ikut bertanggung jawab terhadap HAM dan Ekonomi.

- Salah satu Dewan Juri Kompetisi Seni Rupa Ruang Publik Omah Munir, Debra Yatim menyerahkan hadiah kepada pemenang (Foto : Omah Munir)



- Penyusunan cetak biru atau *blueprint* kurasi museum dengan periode kerja September 2019-Maret 2020 masih belum selesai. Saat ini pedoman kurasi museum masih dalam bentuk draf yang didiskusikan oleh tim kurator. Omah Munir sudah melaksanakan sejumlah *focus group discussion* (FGD) dengan tim kurasi dan perwakilan masyarakat sipil komunitas peduli HAM untuk mengembangkan museum Omah Munir, antara lain sebagai pusat edukasi HAM masyarakat di Indonesia dari perspektif masyarakat sipil.
- Eksepsi Multimedia Ruang Anak. Kegiatan pembangunan Ruang Anak di Museum HAM Omah Munir akan dialihkan untuk kegiatan pameran keliling di tiga kota, yakni Jakarta, Surabaya, Makassar, untuk mensosialisasikan pembangunan Museum HAM Omah Munir yang baru, sekaligus melakukan penggalangan dana.
- Pembuatan Modul di sekolah dan pengunjung museum. Modul yang bertujuan untuk mengarusutamakan isu HAM dalam pendidikan di sekolah dan pengunjung museum merupakan kelanjutan dari proyek sebelumnya. Omah Munir melibatkan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan siswa sebagai *pilot project* di beberapa sekolah di Jakarta, Malang dan Semarang. Desain modul pendidikan HAM di sekolah masih dalam proses penyelesaian oleh tim modul dari Peace-Gen.

Selama penyusunan modul ini, para guru dan siswa sangat antusias untuk mengenal perspektif HAM dengan cara baru, di luar kebiasaan cara belajar mereka di sekolah. Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari guru dan siswa. Mereka menjadi tahu, bahwa memahami tentang HAM dalam keseharian dengan lebih mudah. Para guru juga berharap ada kelanjutan untuk membuat modul pembelajaran HAM guna membantu para guru di sekolah.



Program: Lokakarya Kuratorial Museum HAM Omah Munir dan Desain Modul Pengayaan Materi HAM di Sekolah **Lokasi Program:** DKI Jakarta, Semarang, Malang **Organisasi:** Yayasan Museum HAM Omah Munir **Situs Resmi:** www.omahmunir.org

Capaian

- Karya seni instalasi dan patung sebagai simbol-simbol yang memperkaya tata ruang di dalam gedung museum hasil kerjasama Omah Munir dengan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dengan dukungan Yayasan Tifa pada Mei 2019.

Tantangan

- Jejaring dengan organisasi guru atau grup guru mata pelajaran HAM masih belum kuat. Omah Munir mencoba memperkuat jejaring tersebut.
- Waktu pelaksanaan *pilot project* belum sesuai dengan jadwal sekolah karena terbentur dengan jadwal ujian, kemudian terhambat oleh pandemi COVID-19.
- Kegiatan penyusunan cetak biru kurasi Museum HAM Munir yang baru bergantung pada jadwal pembangunan Museum HAM. Jadwal penganggaran dana daerah tahun 2020 yang cepat dan tidak sesuai dengan tim kurasi untuk produksi eksibisi dan penggalangan dana.
- Data, dokumentasi dan artefak tentang sejarah HAM di Indonesia tidak terdokumentasi dengan baik dan banyak yang hilang. Omah Munir berupaya berhubungan dengan media serta lembaga internasional yang menyimpan dokumentasi tersebut.
- Kebijakan PSBB dan Status Darurat COVID-19 menghentikan semua aktivitas yang sedang berjalan, termasuk rencana lelang Pemkot Batu untuk memilih kontraktor pembangunan Gedung Museum HAM. Tim Kurasi yang dibentuk Omah Munir tetap melanjutkan pembahasan dan penyusunan Cetak Biru secara *online*.

Dari *pilot project* modul tersebut juga diketahui, para siswa di Jakarta lebih ekspresif mengenali bentuk HAM dalam kehidupan sehari-hari, dibandingkan para pelajar dari kota Semarang dan Malang. Hal ini antara lain karena lingkungan sosiologis di kota besar dan daerah yang melatarbelakangi para siswa tersebut.

Berdasarkan materi program HAM dari aspek hak sipil dan politik, serta ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), ke depan Omah Munir akan memprioritaskan isu-isu HAM terkait hak perempuan, hak buruh, difabel, termasuk aspek sejarah gerakan masyarakat sipil memperjuangkan hak-hak atas tanah di sejumlah daerah selama Orde Baru. Organisasi masyarakat sipil yang hadir dalam *workshop* kurasi telah memberikan masukan untuk dijadikan bahan cetak biru kurasi museum HAM Munir.

WALHI

EKOSIDA, KEJAHATAN SERIUS TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP



• Buku Ecocide terbitan WALHI atas dukungan Tifa

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memomorsatukan pembangunan yang mengutamakan eksploitasi sumber daya alam dengan cara mengundang investor dan pemodal sebanyak-banyaknya. Kerusakan lingkungan yang timbul akibat model pembangunan seperti ini belum menjadi perhatian serius, sehingga setiap tahun kerusakan lingkungan bertambah parah.

Kerusakan lingkungan yang bertambah parah membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tergerak untuk mempertajam konsep kerusakan lingkungan dan mengampanyekannya kepada masyarakat serta otoritas.

WALHI berupaya mendorong agar hak atas lingkungan hidup diakui sebagai hak asasi manusia serta kejahatan terhadap lingkungan hidup diakui sebagai salah satu kejahatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu upaya

tersebut adalah dengan memperluas diskursus Ekosida, pemusnahan sumber daya alam yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Guna menekan praktik ekosida dan pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi, pada 2019 WALHI meluncurkan program bertajuk Memperkuat Peranan Masyarakat dalam Mendorong Perlindungan dan Pemulihan HAM Melalui Kebijakan Negara dari Kejahatan Korporasi. Program ini merupakan rangkaian kampanye yang diusung WALHI untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekosida dan penegakan HAM.

Perumusan konsep ekosida dengan banyak pemangku kepentingan dinilai cukup fundamental. Sebab itu, WALHI berupaya mengkaji lebih dalam dan mengenalkannya kepada semua pemangku kepentingan, terutama kepada para pengambil kebijakan dan lembaga peradilan, dua otoritas penting bagi masyarakat sipil jika di kemudian hari kasus-kasus kejahatan ekosida masuk ke meja hijau.

WALHI telah melaksanakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan literasi ekosida, antara lain membuat komitmen bersama antara WALHI dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lalu, menyelenggarakan dialog publik bertajuk Masa Depan Hak atas Lingkungan Hidup dan HAM Lima Tahun ke Depan, pada 3 Desember 2019.

Dialog publik tersebut cukup menarik perhatian masyarakat, terutama kalangan muda (milenial) yang mengetahui kegiatan tersebut melalui media sosial. Dialog ini dihadiri oleh para narasumber yang kompeten, antara lain ekonom dan pegiat lingkungan senior di Indonesia, Prof. Dr. Emil Salim, sehingga kegiatan ini mendapat liputan media yang cukup besar.



Sebab lainnya, sebagai hasil analisis WALHI, publik merasa kondisi demokrasi di Indonesia sedang berada di titik terendahnya sejak reformasi. Antara lain, ditandai dengan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dibahas hingga disahkan di DPR dalam waktu relatif singkat. Selain itu adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kontroversial dan menimbulkan penolakan luas. Kondisi sosial politik pada 2019 seperti itulah yang mendorong WALHI ikut bergabung dalam koalisi masyarakat sipil yang dikenal dengan tagar #ReformasiDikorupsi.

Beberapa kegiatan lain yang dapat dilaksanakan oleh WALHI sebelum dan pada masa COVID-19 ialah:

- Penyusunan modul pelatihan lingkungan dan HAM, mengadakan pendidikan dan pelatihan HAM untuk pegiat lingkungan hidup, komunitas, serta mitra WALHI di daerah.
- Mengampanyekan kejahatan ekosida bersama gerakan masyarakat sipil pada sidang IGWG (*Inter-Governmental Working Group on Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Respect to Human Rights*), Oktober 2019.



Program : Memperkuat Peranan Masyarakat Dalam mendorong Perlindungan dan Pemulihan HAM Melalui Kebijakan Negara dari Kejahatan Korporasi.
Lokasi Program: Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur **Organisasi:** Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) **Situs Resmi:** www.walhi.or.id

- Menggiatkan kampanye ekosida dan HAM di media sosial, termasuk kegiatan advokasi kebijakan lingkungan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Upaya meningkatkan literasi ekosida kepada publik juga direalisasikan melalui buku *Ekosida Memutus Impunitas Korporasi* yang diluncurkan pada Mei 2019.
- *Workshop* identifikasi pelanggaran HAM terhadap pejuang Lingkungan Hidup di pulau Jawa dan merancang advokasi bersama, di kantor Eksekutif Nasional, pada tanggal 8-10 Desember 2019. Peserta kegiatan ini adalah masyarakat korban dan aktivis WALHI dari lima provinsi di Jawa yakni Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat.



- Peluncuran dan Bedah Buku *Ecocide* di Jakarta. (Foto : WALHI)
- Aktivis WALHI ikut serta dalam sebuah aksi demonstrasi. (Foto : WALHI)

Program-program WALHI bersama Tifa seharusnya berlangsung sejak September 2019 hingga Agustus 2020. Namun, pada Maret, sejak diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna mencegah penyebaran wabah COVID-19, program WALHI diperpanjang hingga Desember 2020.

Selama pandemi COVID-19 ini, WALHI menekankan kegiatannya dengan mengedukasi publik secara daring atau *online* melalui media sosial dan diskusi *online*. Sampai pertengahan Maret, akun media sosial WALHI memiliki cukup banyak pengikut: Twitter sebanyak 148.900 pengikut, Facebook 64.671 pengikut, dan Instagram sebanyak 33.000 pengikut. WALHI juga memproduksi *e-Newsletter* untuk menjangkau publik yang lebih luas.

Ke depan, dengan kampanye, dialog, riset, publikasi, melalui semua kanal dan jaringan yang dimiliki, WALHI meyakini diskursus ekosida akan semakin meluas dan membuka cakrawala baru dalam menghentikan ekosida di Indonesia.



YAYASAN PUSAKA BENTALA RAKYAT MELINDUNGI EKOLOGI DAN MASYARAKAT ADAT

Pembangunan yang berlangsung di sejumlah daerah Indonesia belum memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) termasuk hak-hak masyarakat adat. Lantaran demikian, aktivitas Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) yang berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk mengadvokasi diri mereka sendiri, penting untuk terus didorong.

Pusaka yang telah fokus mengadvokasi masyarakat adat sejak 2001, bersama Yayasan Tifa pada 2019, menjalankan sejumlah program di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Boven Digoel, Papua, dan Kabupaten Sorong, termasuk Sorong Selatan, Papua Barat. Di wilayah kerja tersebut, Pusaka memberdayakan komunitas adat dan juga berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya, yakni pemerintah daerah, pemerintah pusat, pegiat lingkungan, dan lain-lain.



• Pelatihan untuk pembela HAM lingkungan di Tanah Merah, Boven Digoel.
(Foto : Pusaka).

Masyarakat adat di wilayah kerja tersebut telah lama mengalami ketidakadilan ekonomi dan sosial-budaya. Kekerasan pada masyarakat adat dan laju deforestasi hutan (peralihan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit) kian meningkat dalam beberapa tahun terakhir, akibat buruknya tata kelola industri perkebunan, tumpang tindih perizinan dan korupsi.

Studi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2016 menyebutkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, konflik lahan, serta kebakaran hutan seluas 2,6 juta hektare berpotensi merugikan negara sebesar Rp 221 triliun. Mirisnya, berdasarkan pemantauan Pusaka, aktivitas korporasi yang meminggirkan masyarakat adat masih terjadi di masa pandemi COVID-19 karena aktivitas masyarakat berkurang, sedangkan sebagian korporasi masih tetap beraktivitas. Seakan-akan tidak ada alasan apapun bagi korporasi untuk menghentikan aktivitas mereka meski dalam masa pandemi saat ini.

Dalam program-programnya, Pusaka memperkuat literasi masyarakat adat, melakukan pendampingan, hingga meningkatkan literasi hukum, paralegal, hingga kampanye di media sosial yang efektif. Rangkaian kegiatan Pusaka yang mulai digelar pada semester II tahun 2019 itu cukup menggugah minat masyarakat adat dan para pembela HAM lingkungan di area kerja.

Sejumlah pencapaian tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat adat mengikuti pelatihan dan kesadaran hukum. Di Kapuas, misalnya, masyarakat adat semakin terlatih mengomunikasikan aspirasi dan kritik yang beradab melalui media sosial dan mengimplementasikan keahlian bernegosiasi dan berdiplomasi dengan korporasi. Langkah ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Desa yang diimplementasikan oleh warga di dua desa di Kapuas.

Penerbitan Peraturan Desa (Perdes) menjadi catatan menarik dalam program yang dijalankan oleh Pusaka. Perdes tersebut, yang pertama, mengatur tentang kewajiban perusahaan sawit dan korporasi lainnya untuk membayar iuran desa secara rutin kepada institusi desa. Kedua, kewajiban korporasi di wilayah adat untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan.

Meski hanya setingkat desa, penerbitan aturan tersebut membutuhkan persetujuan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, yakni Kementerian Dalam Negeri. Selama proses penerbitan Perdes, Pusaka aktif memfasilitasi inisiatif masyarakat adat mulai dari perumusan Perdes hingga berdialog dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat dan daerah.

Sedangkan di Boven Digoel, Pusaka mendirikan pos bantuan hukum yang menumbuhkan kesadaran hukum kepada suku-suku di wilayah ini. Edukasi hukum bertujuan untuk mencari solusi legal yang mengedepankan penegakan hukum dan meminimalisir kekerasan fisik atau non-fisik.

Berikut rincian program Pusaka sejak September 2019 hingga Mei 2020:

- Melatih masyarakat adat di Kapuas mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar masyarakat adat semakin piawai menyampaikan aspirasi di media sosial. Hasilnya, masyarakat adat dapat menggugah aspirasi dan kritik di Facebook dengan cara elegan.
- Mendirikan Pos Bantuan Hukum di Boven Digoel.



• Berdiskusi dengan masyarakat adat di Papua. (Foto : Pusaka)

- Program Pendidikan dan Pelatihan Advokasi yang digelar di Palangka Raya, diikuti peserta perwakilan masyarakat adat di Kalimantan Tengah serta perwakilan jaringan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah (Kalteng).
- Studi dampak sosial dan lingkungan dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang diduga melibatkan korporasi. Kegiatan ini dilakukan di Kapuas, Kalteng, pada November-Desember 2019.
- Menjalinkan dialog dan lobi dengan pemerintah dan korporasi untuk berkomitmen mematuhi kewajiban dan penghormatan terhadap HAM dan perlindungan sumber daya alam.
- Pelatihan untuk pembela HAM lingkungan di Tanah Merah, Boven Digoel dihadiri perwakilan Suku Awyu dan Suku Wambon Tekamerop.
- Memfasilitasi pertemuan di Kampung Malalilis, Distrik Klayili, Kabupaten Sorong, pada 10 Desember 2019. Kegiatan berbagi pengalaman antara masyarakat adat Moi tentang ketahanan masyarakat dalam menghadapi tekanan perusahaan.
- Pendampingan hukum masyarakat adat di Sorong Selatan, serta para peladang dari masyarakat adat Dayak di Kabupaten Murung Raya.
- Mendampingi masyarakat adat untuk berdialog dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Papua terkait kasus pengusuran hutan keramat .

- Melakukan diskusi terfokus dengan organisasi masyarakat sipil di Papua, bekerja sama dengan WALHI Papua, untuk membahas implikasi dari Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* terhadap masyarakat adat dan otoritas pemerintah daerah.

Selama pelaksanaan program-programnya, Pusaka kerap kali menghadapi beragam hambatan antara lain kondisi alam di Kalteng, Papua, dan Papua Barat relatif sulit diakses dengan moda transportasi, dan akses informasi publik sangat terbatas. Hambatan itu kian terasa di masa pandemi COVID-19. Untuk menyiasatinya, pertemuan Pusaka dengan masyarakat adat dan penggiat HAM lingkungan dilakukan secara virtual, kendati layanan operator telekomunikasi relatif sulit diakses warga di daerah tersebut.



Program : Perlindungan Pembela HAM Lingkungan dan Masyarakat Adat dalam Advokasi Industri Perkebunan **Lokasi Program** : Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; Boven Digoel, Papua; Kabupaten Sorong, Papua Barat **Organisasi** : Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) **Situs Resmi** : www.pusaka.or.id

LAPORAN
KEUANGAN
2019



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No. : 00900/2.1133/AU.1/11/0258-3/1/V/2020

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Management Yayasan TIFA

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan TIFA, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statements of activities and changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Tel: +62 21 29932121 (Hunting) & +62 21 3144003 • Fax: +62 21 29932113 & +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 42nd & 30th Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan TIFA as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

We draw attention to note 17 to the attached financial statements which describe the economic condition as the impact of corona virus outbreak in Indonesia. The impact on Yayasan TIFA's operation in the future cannot be determined yet as the preventive measures as well fiscal and monetary policies introduced by the Government are still evolving. The attached financial statements do not include adjustments that might result from the outcome of the uncertainty. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other matter

Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The translation of the statement of financial position, statement of activities and other comprehensive income, statement of cash flows, and notes to the financial statements to United States Dollar is presented for convenience of readers based on the basis set out in Note 3 and is not a required part of the basic financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such translation has been subjected to our auditing procedures and, in our opinion, has been prepared, in all material respects, in accordance with the basis set out in Note 3.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Theo'.

Drs. Theo Kusnawara, Ak., CA, CPA, ACPA
Public Accountant License No. AP.0258
Office Business License No. 855/KM.1/2017

May 5, 2020

Yayasan TIFA
Statements of financial position
 As of December 31, 2019

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2019		2018	
		Rp	USD ^{*)}	Rp	USD ^{*)}
CURRENT ASSETS					
Cash and banks	4	3,393,518	244,118	2,972,280	205,254
Receivables from Donors	5	24,122,108	1,735,277	21,697,000	1,498,308
Advances and prepayment		387,996	27,912	405,981	28,035
		27,903,622	2,007,307	25,075,261	1,731,597
NON-CURRENT ASSETS					
Fixed assets	6	13,240,466	952,482	13,383,249	924,194
		13,240,466	952,482	13,383,249	924,194
TOTAL ASSETS					
		41,144,088	2,959,789	38,458,510	2,655,791
CURRENT LIABILITIES					
Grant payables	7	27,052,548	1,946,086	15,155,748	1,046,595
Accruals and other liabilities	8	1,740,524	125,206	524,348	36,211
Taxes payable	9	26,432	1,901	79,302	5,476
Deferred income	10	-	-	8,262,077	570,545
		28,819,504	2,073,193	24,021,475	1,658,827
NON-CURRENT LIABILITIES					
Grant payables	7	3,858,732	277,586	5,283,270	364,842
		3,858,732	277,586	5,283,270	364,842
		32,678,236	2,350,779	29,304,745	2,023,669
NET ASSETS					
Restricted net assets		3,161,694	130,184	3,849,607	179,230
Unrestricted net assets	14	5,304,158	534,095	5,304,158	534,095
Cumulative foreign currency translation differences			(55,269)	-	(81,203)
		8,465,852	609,010	9,153,765	632,122
TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS					
		41,144,088	2,959,789	38,458,510	2,655,791

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Jakarta, May 5, 2020



Shita Laksmi
 Executive Director

Yayasan TIFA
Statements of activities
For the year ended December 31, 2019

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2019		2018	
		Rp	USD ^{*)}	Rp	USD ^{*)}
INCOME					
Contribution income - restricted	11	56,825,026	4,025,952	49,540,953	3,489,843
Grant return from previous years	12	586,602	41,363	1,510,553	104,358
Interest income		40,845	2,886	48,985	3,420
Other income		5,204	370	23,356	1,594
Total income		57,457,677	4,070,571	51,123,847	3,599,215
EXPENSES					
Grant expenses	13	(41,172,448)	(2,918,288)	(35,009,492)	(2,401,887)
Salaries and wages		(3,586,533)	(253,460)	(5,426,596)	(382,096)
Professional fees		(2,806,966)	(198,971)	(2,074,088)	(144,647)
Airfare		(1,492,165)	(105,589)	(1,996,925)	(138,201)
Travelling expenses		(1,336,083)	(94,360)	(1,413,226)	(97,797)
Depreciation		(940,202)	(66,673)	(963,459)	(66,533)
Conference and meetings		(2,646,918)	(187,323)	(3,094,616)	(215,885)
Utilities		(323,806)	(22,832)	(179,209)	(12,537)
Local transportation		(584,206)	(41,246)	(673,269)	(46,518)
Foreign exchange gain (loss), net		(763,533)	(54,253)	902,682	63,369
Employee allowances		(1,121,742)	(79,258)	(305,166)	(21,337)
Publication and printing		(238,508)	(16,876)	(350,649)	(24,115)
Others		(1,132,480)	(80,488)	(1,830,741)	(198,083)
Total expenses		(58,145,590)	(4,119,617)	(52,414,754)	(3,686,267)
Changes in net assets		(687,913)	(49,046)	(1,290,907)	(87,052)

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Jakarta, May 5, 2020


Shita Laksmi
Executive Director

Yayasan TIFA
Statements of changes in net assets
 For the year ended December 31, 2019

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2019		2018	
		Rp	USD ^{*)}	Rp	USD ^{*)}
NET ASSETS					
Beginning of the year:					
Restricted		3,849,607	179,230	5,140,514	266,282
Unrestricted	14	5,304,158	534,095	5,304,158	534,095
Cumulative foreign currency translation differences		-	(81,203)	-	(29,437)
		9,153,765	632,122	10,444,672	770,940
Changes in net assets for the year:					
Restricted		(687,913)	(49,046)	(1,290,907)	(87,052)
Unrestricted	14	-	-	-	-
		(687,913)	(49,046)	(1,290,907)	(87,052)
Foreign currency translation differences			25,934	-	(51,766)
Ending of the year:					
Restricted		3,161,694	130,184	3,849,607	179,230
Unrestricted	14	5,304,158	534,095	5,304,158	534,095
Cumulative foreign currency translation differences		-	(55,269)	-	(81,203)
		8,465,852	609,010	9,153,765	632,122

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Jakarta, May 5, 2020


Shita Laksmi
 Executive Director

Yayasan TIFA
Statements of cash flows
For the year ended December 31, 2019

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2019		2018	
		Rp	USD ^{*)}	Rp	USD ^{*)}
Cash flows from operating activities					
Change in net assets		(687,912)	(49,052)	(1,290,905)	(87,050)
Add/(deduct) items not affecting the operating cash flows:					
Depreciation	6	940,202	66,672	963,459	66,533
Interest income		(40,845)	(2,887)	(48,985)	(3,420)
Unrealized foreign exchange gain		1,124	79	27,437	1,926
Changes in assets and liabilities					
Receivables from donors		(2,425,107)	(236,972)	(13,194,815)	(870,747)
Prepaid tax				62,616	4,622
Advances and prepayments		17,985	124	(27,498)	(99)
Grant payables		11,896,800	899,492	1,432,882	33,688
Accruals and other liabilities		(208,364)	1,742	4,952,324	337,923
Taxes payable		(52,870)	(3,575)	79,302	5,476
Deferred income		(8,262,077)	(570,545)	(10,340,759)	(802,561)
Interest income received		40,845	2,887	48,985	3,420
Net cash flows provided from (used in) operating activities		1,219,781	107,965	(17,335,957)	(1,310,289)
Cash flows from investing activity					
Purchases of fixed assets	6	(797,419)	(56,664)	(65,352)	(4,513)
Net cash flows used in investing activity		(797,419)	(56,664)	(65,352)	(4,513)
Net increase (decrease) in cash and banks for the year		422,362	51,301	(17,401,309)	(1,314,802)
Cash and banks at the beginning of the year		2,972,280	205,254	20,401,026	1,505,833
Effect of exchange rate changes on cash and banks		(1,124)	(79)	(27,437)	(1,926)
Foreign currency translation differences		-	(12,358)	-	16,149
Cash and banks at the end of the year	3	3,393,518	244,118	2,972,280	205,254

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Jakarta, May 5, 2020


Shita Laksmi
Executive Director

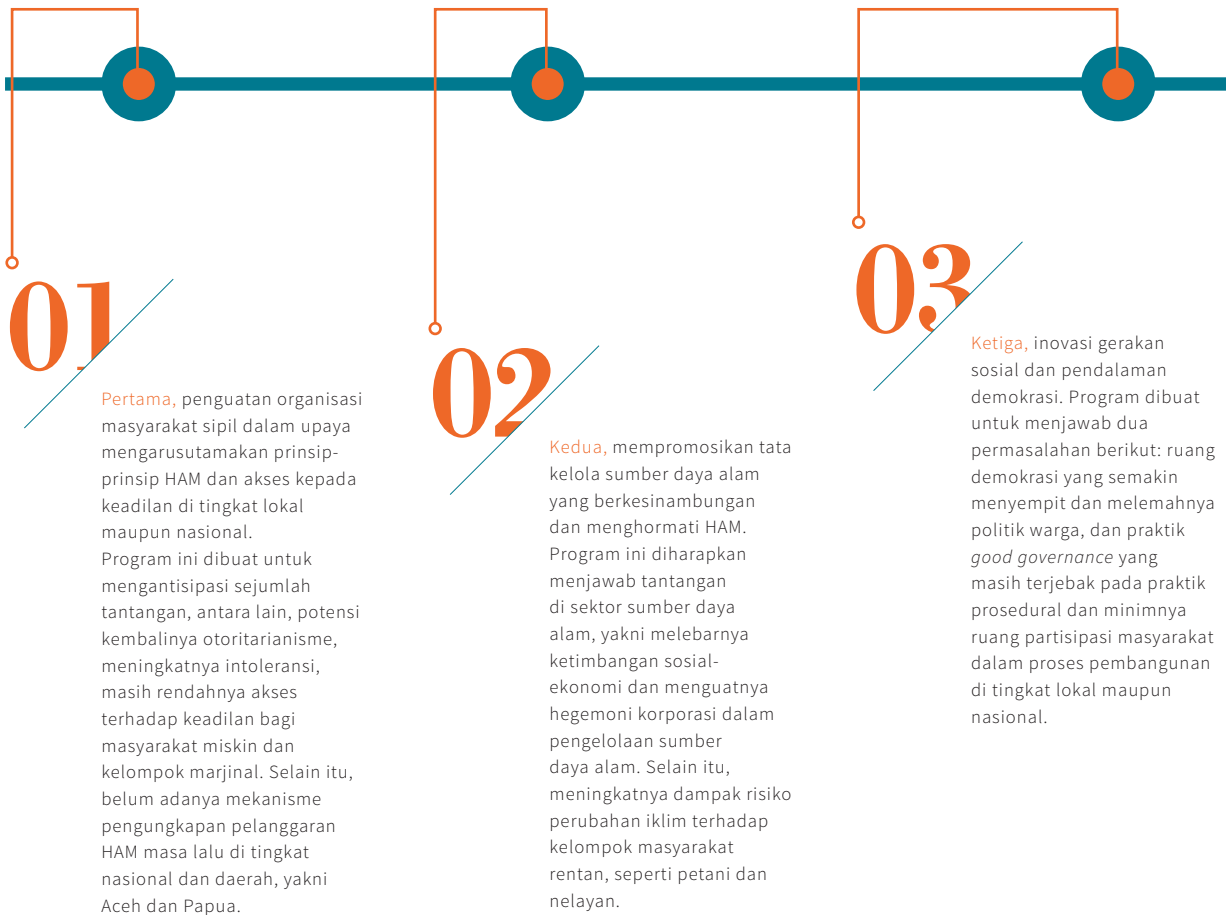
PROGRAM STRATEGIS 2020 - 2024

Yayasan Tifa dan para mitranya di Indonesia telah melalui sejumlah peristiwa besar sepanjang 2019. Mulai dari proses pelaksanaan pemilihan umum hingga konsolidasi kekuasaan negara pasca Pemilu melalui pengesahan sejumlah undang-undang yang merugikan masyarakat sipil.

Pengalaman di 2019 diharapkan membawa banyak pelajaran berharga bagi para mitra dan Yayasan Tifa sendiri dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah di tahun-tahun mendatang. Pada beberapa tahun mendatang tantangan masyarakat sipil diproyeksikan masih berkuat pada masalah akses keadilan, tata kelola sumber daya alam yang tak menghormati prinsip HAM.

Selain itu, dampak pandemi COVID-19 bagi masyarakat, terutama masyarakat rentan secara ekonomi, perlu direspon dengan cepat dan serius.

Sebab itu, Yayasan Tifa telah merancang empat program strategis utama dan dua program lintas isu yang akan menjadi kerangka program 2020 hingga 2024.



04

Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital. Program ini untuk merespon empat masalah di sektor data digital, yakni: pertama, belum terciptanya ekosistem perlindungan data pribadi yang diciptakan oleh Pemerintah yang komprehensif serta mumpuni di Indonesia. Kedua, pengetahuan dan kapasitas masyarakat sipil terkait perlindungan data pribadi belum cukup dan belum meluas. Ketiga, belum terlibatnya masyarakat sipil dalam proses penyusunan regulasi data digital atau *emerging technologies*. Masalah keempat di sektor data digital ialah belum terbentuknya proses pertanggung jawaban dari semua sektor terlibat dalam ekosistem data digital, terutama platform digital. Kerjasama multistakeholder perlu ada karena kompleksitas ekosistem data digital: komunitas teknis, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan pemerintah. Kapasitas publik juga masih rendah dalam memahami kompleksitas ini.

05

Kelima, perlindungan untuk pegiat hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Program ini setiap tahun masih perlu menjadi perhatian Yayasan Tifa karena para pegiat HAM dan pegiat lingkungan dan Sumber daya Alam masih sering mengalami intimidasi dan represi di sejumlah daerah.

06

Keenam, program merespon pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca pandemi. Yayasan Tifa menilai program ini sangat strategis karena pandemi COVID-19 akan merugikan masyarakat rentan secara ekonomi terhadap sejumlah kebutuhan mendasar seperti pekerjaan dan pendidikan.

Dengan alasan pandemi, Pemerintah juga melakukan pembatasan terhadap beberapa hak sipil-politik rakyat. Program ini juga diharapkan dapat menjawab permasalahan sosial baru yang timbul antara lain bertambahnya jumlah pengangguran dan kaum miskin di kota dan desa.

Demikianlah sejumlah program Yayasan Tifa yang akan dijalankan bersama mitranya di sejumlah daerah di Indonesia. Yayasan Tifa juga membuka partisipasi dan kerjasama dengan mitra-mitra internasional untuk menjalankan program-program strategis tersebut di Indonesia.





18 Office Park, Lt. 15 unit C-D
Jl. T.B. Simatupang No. 18
Kebagusan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12520 - Indonesia
Email: public@tifafoundation.id